

Proses Kolaborasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Pengurangan Risiko Bencana di Desa Wisata Amping Parak

Irva Afrizalni¹, Yulia Hanoselina²

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
Email: irvaafrizalni19889@gmail.com¹, yuliahanoselina@fis.unp.ac.id²

Abstract. Sustainable tourism village development requires collaborative governance, particularly in areas with high disaster vulnerability. Desa Wisata Amping Parak in Pesisir Selatan Regency is one example of a tourism village that has successfully integrated ecotourism development with a Disaster Risk Reduction (DRR) approach. This study aims to analyze the collaborative process among actors in the development of DRR-based ecotourism in Desa Wisata Amping Parak using the collaborative governance framework proposed by Ansell and Gash (2008), which consists of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and the collaborative process. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation review, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings indicate that collaboration is supported by initial conditions characterized by resource imbalances, non-material participation incentives, and the absence of conflict among actors. The institutional design is strengthened by regulatory support and the institutionalization of Pokdarwis LPPL as a coordination hub. Facilitative leadership plays a key role in fostering trust and participation, while the collaborative process unfolds through face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, shared understanding, and the achievement of intermediate outcomes. This collaboration generates small wins that reinforce legitimacy and the sustainability of cooperation. The study concludes that collaboration in Desa Wisata Amping Parak has been implemented effectively and has the potential to serve as a best practice for DRR-based tourism village development.

Keywords: Collaboration, Tourism Village, Ecotourism Development, Disaster Risk Reduction (DRR).

Abstrak. Pengembangan desa wisata yang berkelanjutan memerlukan tata kelola kolaboratif, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Desa Wisata Amping Parak di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu desa wisata yang berhasil mengintegrasikan pengembangan ekowisata dengan pendekatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antaraktor dalam pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana (PRB) di Desa Wisata Amping Parak dengan menggunakan kerangka teori kolaborasi Ansell dan Gash (2008), yang meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi didukung oleh kondisi awal berupa ketidakseimbangan sumber daya, insentif partisipasi non-material, dan ketiadaan konflik antaraktor. Desain kelembagaan diperkuat oleh regulasi dan kelembagaan Pokdarwis LPPL sebagai simpul koordinasi. Kepemimpinan fasilitatif berperan dalam membangun kepercayaan dan partisipasi, sementara proses kolaborasi berjalan melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara. Kolaborasi ini menghasilkan *small wins* yang memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kerja sama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi di Desa Wisata Amping Parak telah berjalan secara efektif dan berpotensi menjadi praktik baik pengembangan desa wisata berbasis PRB.

Kata Kunci: Kolaborasi, Desa Wisata, Pengembangan Ekowisata, Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Received Feb 02, 2026; Revised March 16, 2026; Accepted May 29, 2026

* [irvaafrizalni](mailto:irvaafrizalni19889@gmail.com): Email: irvaafrizalni19889@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya yang sangat beragam, sehingga memiliki potensi pariwisata yang luas dan strategis untuk dikembangkan secara berkelanjutan (Rahma, 2020). Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG, 2024), hingga tahun 2024 Indonesia telah mengidentifikasi dan memverifikasi sebanyak 17.380 pulau. Kondisi geografis tersebut menciptakan keragaman bentang alam pesisir, laut, dan perdesaan yang menjadi modal utama bagi pengembangan berbagai bentuk pariwisata, termasuk wisata bahari, ekowisata, dan desa wisata berbasis komunitas. Kekayaan alam dan budaya ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga membuka peluang bagi pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan apabila dikelola dengan tata kelola yang tepat (Mulia, 2021).

Sektor pariwisata memiliki peran sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Pariwisata berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan devisa negara (Akbar, 2022; Hardiyansyah, 2023). Pada triwulan III tahun 2024, sektor pariwisata diperkirakan berkontribusi sebesar 4,01% terhadap PDB nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia menargetkan kontribusi sektor pariwisata sebesar 4,6% terhadap PDB pada tahun 2025 dengan estimasi devisa antara USD 19 hingga 22,1 miliar. Untuk mencapai target tersebut, percepatan pembangunan desa wisata ditetapkan sebagai salah satu strategi utama pembangunan pariwisata nasional yang menekankan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan digitalisasi (Kemenparekraf, 2024).

Desa wisata dipahami sebagai suatu wilayah desa yang dikembangkan sebagai destinasi pariwisata dengan mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas pendukung, aksesibilitas, serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat dalam satu kesatuan yang utuh (Permenparekraf Nomor 3 Tahun 2022). Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat bertujuan tidak hanya untuk menciptakan pengalaman wisata yang autentik, tetapi juga untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan melalui prinsip gotong royong dan partisipasi masyarakat (Buku Pedoman Desa Wisata, 2021).

Perkembangan desa wisata di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat peningkatan jumlah desa wisata dari 1.831 desa pada tahun 2021 menjadi 6.187 desa pada tahun 2024 (Kemenparekraf, 2024; Jadesta, 2024). Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjadikan desa wisata sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Namun, keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh peningkatan jumlah, melainkan juga oleh kualitas tata kelola, inovasi, dan keberlanjutan pengelolannya.

Salah satu upaya untuk mendorong kualitas desa wisata diwujudkan melalui program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini dirancang sebagai instrumen apresiasi sekaligus evaluasi terhadap kinerja desa wisata berdasarkan indikator daya tarik, amenitas, digitalisasi, kelembagaan, dan resiliensi. Pada ajang ADWI tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat menunjukkan capaian yang membanggakan dengan tiga desa wisata berhasil masuk dalam 50 besar nasional, salah satunya adalah Desa Wisata Amping Parak di Kabupaten Pesisir Selatan (Westsumatra360, 2024).

Desa Wisata Amping Parak menjadi menarik untuk dikaji karena keberhasilannya dalam mengintegrasikan pengembangan ekowisata dengan pendekatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Desa wisata ini tidak hanya mengandalkan keindahan alam pesisir sebagai daya tarik, tetapi juga menjadikan konservasi lingkungan, pelestarian mangrove dan cemara laut, serta edukasi mitigasi bencana sebagai bagian integral dari produk wisata. Pemerintah

Nagari Amping Parak telah mendukung pengembangan tersebut melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekowisata, Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekowisata Berbasis PRB, serta Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami (Mongabay, 2024).

Keberhasilan Desa Wisata Amping Parak dalam menerapkan konsep ekowisata berbasis PRB mendapatkan pengakuan nasional melalui penghargaan Juara III Kategori Resiliensi pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2024. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa pengembangan desa wisata di Amping Parak tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada ketahanan wilayah dan keselamatan pengunjung. Penilaian ini didasarkan pada kemampuan desa wisata dalam mengelola risiko keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, termasuk penyediaan jalur evakuasi, rambu kebencanaan, sarana keselamatan wisatawan, dan program edukasi kesiapsiagaan bencana (Jadesta, 2024).



Gambar 1 Penerimaan penghargaan Juara III Kategori Resiliensi Desa Wisata Amping Parak pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2024

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1, capaian penghargaan tersebut menegaskan bahwa Desa Wisata Amping Parak berhasil membangun model pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada ketahanan dan keberlanjutan wilayah. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antar pemangku kepentingan, yang melibatkan pengelola desa wisata (Pokdarwis LPPL), masyarakat, pemerintah nagari, pemerintah daerah, dan mitra eksternal. Kolaborasi ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh keterlibatan aktif berbagai aktor, interaksi yang berkesinambungan, kepercayaan, dan tujuan bersama.

Meskipun Desa Wisata Amping Parak telah memperoleh pengakuan sebagai praktik unggul (*best practice*) di tingkat nasional, hingga saat ini masih terbatas kajian ilmiah yang secara sistematis mendokumentasikan dan menganalisis bagaimana kolaborasi antaraktor dibangun dan dijalankan dalam mendukung keberhasilan tersebut. Padahal, pemahaman mengenai bentuk kolaborasi diperlukan sebagai dasar pembelajaran dan replikasi bagi pengembangan desa wisata tangguh bencana di wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kolaborasi dalam pengembangan ekowisata berbasis Pengurangan Risiko Bencana di Desa Wisata Amping Parak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan proses kolaborasi dalam pengembangan ekowisata berbasis PRB di Desa Wisata Amping Parak. Penelitian dilaksanakan di Desa Wisata Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang dipilih secara *purposive* karena keberhasilannya dalam mengintegrasikan ekowisata berbasis PRB, sebagaimana ditunjukkan melalui capaian Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) kategori resiliensi tahun 2024. Fokus penelitian diarahkan pada proses kolaborasi antaraktor dalam keberhasilan pengembangan ekowisata berbasis PRB. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengembangan ekowisata berbasis PRB. Data penelitian berupa data kualitatif yang bersifat non-numerik yang bersumber dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal (*Initial Conditions*)

Kondisi awal merupakan tahapan awal yang mempengaruhi sebelum kolaborasi terjadi. Kondisi awal di Desa Wisata Amping Parak merupakan keadaan awal yang menjadi dasar terbentuknya kolaborasi antaraktor dalam pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana. Kondisi awal ini berkaitan dengan aktor yang terlibat, ketidakseimbangan sumber daya, insentif partisipasi, dan sejarah kerjasama sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007).

Ketidakseimbangan Sumber Daya

Ketidakseimbangan sumber daya pada kondisi awal kolaborasi terlihat dari keterbatasan sumber daya alam, sarana prasarana, serta kapasitas kelembagaan yang dimiliki masyarakat Desa Wisata Amping Parak. Terdapat ketidakseimbangan sumber daya di antara para stakeholders. Pokdarwis LPPL dan masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terhadap karakteristik lingkungan pesisir Amping Parak dan kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan, namun memiliki keterbatasan sumber daya finansial, sarana prasarana, dan kapasitas kelembagaan. Pemerintah nagari dan pemerintah daerah memiliki kewenangan regulatif dan potensi dukungan kebijakan, sedangkan BPBD memiliki kapasitas teknis dalam mitigasi bencana, dan mitra eksternal seperti Bank Nagari memiliki sumber daya pendanaan yang dapat mendukung pengembangan fasilitas wisata dan kegiatan konservasi.

Ketidakseimbangan sumber daya tersebut justru mendorong terjadinya kolaborasi karena masing-masing aktor menyadari bahwa tujuan pengembangan ekowisata berbasis PRB tidak dapat dicapai secara mandiri. Pokdarwis dan masyarakat membutuhkan dukungan kebijakan, teknis, dan pendanaan, sementara pemerintah dan mitra eksternal membutuhkan aktor lokal yang memahami kondisi lapangan dan mampu menjaga keberlanjutan program. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan sumber daya dalam *collaborative governance* dapat menjadi pemicu kolaborasi apabila disertai strategi pemberdayaan aktor yang memiliki kapasitas lebih lemah.

Insentif Partisipasi

Insentif partisipasi para stakeholders pada tahap awal kolaborasi di Desa Wisata Amping Parak tidak semata-mata bersifat material. Insentif utama yang mendorong keterlibatan aktor lokal adalah keinginan untuk melindungi kawasan pesisir dari abrasi, gelombang tinggi, dan potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Keberhasilan awal penanaman mangrove dan cemara laut memberikan *small wins* yang bersifat non-material, berupa meningkatnya rasa aman, kepercayaan diri masyarakat, dan keyakinan bahwa upaya kolektif dapat memberikan hasil nyata. Seiring waktu, insentif tersebut berkembang menjadi insentif sosial dan ekonomi, seperti tumbuhnya peluang ekowisata berbasis konservasi dan edukasi kebencanaan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Arifin (2019) yang menyatakan bahwa insentif dalam kolaborasi tidak hanya berbentuk material, tetapi juga non-material seperti penghargaan, rasa aman, dan keberlanjutan sosial. Kolaborasi akan meningkat meskipun terdapat ketidakseimbangan sumber daya, apabila para stakeholders meyakini bahwa pencapaian tujuan bergantung pada kerja sama dengan aktor lain.

Sejarah Kerjasama

Sejarah hubungan antaraktor dalam kolaborasi di Desa Wisata Amping Parak tidak diawali oleh konflik atau hubungan yang buruk. Sebaliknya, kolaborasi tumbuh dari aktivitas bersama yang bersifat informal dan sukarela, khususnya melalui inisiatif pemuda yang tergabung dalam Pokdarwis LPPL. Sebelum adanya kerja sama formal dengan pemerintah dan mitra eksternal, tidak terdapat riwayat hubungan kerja sama sebelumnya, baik dalam pengembangan wisata maupun mitigasi bencana. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata berbasis PRB di Desa Wisata Amping Parak menjadi cikal bakal terbentuknya hubungan kolaboratif antaraktor yang kemudian berkembang secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, kondisi awal kolaborasi dalam pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana di Desa Wisata Amping Parak menunjukkan karakteristik yang mendukung terbentuknya *collaborative governance*. Ketidakseimbangan sumber daya antaraktor justru berfungsi sebagai pemicu kolaborasi, karena masing-masing pihak menyadari keterbatasan dan kebutuhan akan dukungan aktor lain. Insentif partisipasi tidak semata-mata bersifat material, tetapi didorong oleh kepentingan bersama untuk menjaga keselamatan kawasan pesisir dan keberlanjutan lingkungan, yang kemudian berkembang menjadi peluang sosial dan ekonomi melalui ekowisata. Ketiadaan sejarah konflik dan tumbuhnya kerja sama dari inisiatif lokal secara sukarela menciptakan fondasi kepercayaan awal yang kuat bagi berkembangnya kolaborasi secara bertahap dan berkelanjutan.

2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Desain kelembagaan dalam kolaborasi pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana (PRB) di Desa Wisata Amping Parak mengacu pada seperangkat aturan dasar yang disepakati oleh para pemangku kepentingan sebagai pedoman dalam menjalankan kolaborasi. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) yang menekankan pentingnya desain kelembagaan yang inklusif, transparan, dan adaptif dalam mendukung keberlanjutan kolaborasi lintas aktor. Pada tahap awal, pengelolaan kawasan pesisir dan kegiatan ekowisata di Desa Wisata Amping Parak berjalan secara informal dan berbasis kepercayaan antar pemuda dan masyarakat. Seiring meningkatnya intensitas kegiatan dan keterlibatan aktor eksternal, dibentuklah Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) sebagai wadah koordinasi. LPPL kemudian dilembagakan secara formal melalui Surat

Keputusan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang memberikan legitimasi hukum serta memperjelas struktur dan peran kelembagaan.

Desain kelembagaan kolaborasi diperkuat dengan adanya regulasi dan dokumen perencanaan yang menjadi landasan pengembangan ekowisata berbasis PRB. Pemerintah Nagari Amping Parak menetapkan Peraturan Nagari tentang pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana, serta menyusun rencana induk pengembangan ekowisata dan dokumen rencana kontinjensi gempa bumi dan tsunami. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pengarah kegiatan kolaboratif agar pengembangan wisata tetap selaras dengan prinsip keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Molla et al. (2021) yang menyatakan bahwa regulasi merupakan kewenangan formal lembaga untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas dalam yurisdiksinya.

Pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana (PRB) di Desa Wisata Amping Parak melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga lembaga teknis, BUMN, dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah nagari berperan dalam menyediakan penerbitan dasar hukum, menyusun aturan dan pembangunan fasilitas pendukung ekowisata. Pemerintah kecamatan dan kabupaten mendukung melalui koordinasi administrasi, peningkatan akses, pembinaan kelembagaan, dan dukungan promosi desa wisata. Pemerintah provinsi dan dinas terkait memberikan dukungan teknis, khususnya dalam kegiatan konservasi pesisir, seperti penetapan kawasan konservasi, penanaman mangrove, serta pelatihan pariwisata dan pengelolaan sumber daya kelautan. Upaya pengurangan risiko bencana diperkuat oleh BPBD melalui kegiatan pelatihan kebencanaan, pembentukan kelompok siaga bencana, dan penyediaan sarana mitigasi seperti sistem peringatan dini tsunami. BUMN dan organisasi non-pemerintah turut berkontribusi melalui pembangunan sarana pendukung, kegiatan edukasi lingkungan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak dengan peran yang saling mendukung ini menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata berbasis PRB di Desa Wisata Amping Parak dijalankan melalui kerja sama yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, tata kelembagaan kolaborasi di Desa Wisata Amping Parak telah berjalan secara baik. Pokdarwis LPPL berperan sebagai simpul utama koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan mitra eksternal. Setiap bentuk kerja sama dengan lembaga pendukung dijalankan melalui mekanisme formal berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) dan disertai dengan laporan pertanggungjawaban. Praktik ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan kolaborasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten dalam praktik pengelolaan ekowisata berbasis PRB.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Kepemimpinan fasilitatif merupakan unsur penting dalam keberhasilan proses kolaborasi. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa kepemimpinan berperan dalam membangun dan menjaga kepercayaan, memfasilitasi dialog, menjembatani kepentingan aktor yang beragam, sekaligus memastikan keberlanjutan proses kolaborasi. Dalam pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana di Desa Wisata Amping Parak, kepemimpinan fasilitatif ditunjukkan oleh aktor lokal, khususnya Ketua Pokdarwis LPPL, yang berperan sebagai penggerak dan penghubung antaraktor. Kepemimpinan yang dijalankan tidak bersifat dominan atau instruktif, melainkan menekankan pendekatan persuasif, partisipatif, dan berbasis keteladanan. Pemimpin lokal lebih berperan dalam mengajak, memfasilitasi, dan membuka ruang partisipasi bagi pemuda dan masyarakat dalam setiap kegiatan perlindungan pesisir dan pengembangan ekowisata.

Kepemimpinan fasilitatif juga tercermin dalam mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan secara kolektif. Setiap rencana kegiatan, kerja sama, maupun pemanfaatan bantuan dibahas bersama dalam forum kelompok, sehingga anggota merasa dilibatkan dan memiliki tanggung jawab yang sama. Pola ini berkontribusi dalam membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program ekowisata dan kegiatan pengurangan risiko bencana yang dijalankan. Kepemimpinan fasilitatif pada level pemerintahan ditunjukkan melalui sikap pemerintah nagari yang memberikan ruang bagi inisiatif masyarakat dan berperan sebagai pendukung, bukan pengendali utama. Pemerintah nagari, kecamatan, dan kabupaten memosisikan diri sebagai fasilitator yang membantu membuka akses, menjembatani komunikasi dengan dinas terkait, dan memperkuat kapasitas kelembagaan Pokdarwis LPPL. Kepemimpinan di tingkat ini berfungsi sebagai mediator antara kepentingan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan dukungan lembaga eksternal.

Berdasarkan temuan tersebut, kepemimpinan fasilitatif dalam pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana di Desa Wisata Amping Parak dapat dikatakan berjalan secara efektif. Kepemimpinan tidak terpusat pada satu aktor yang dominan, melainkan tersebar melalui peran saling melengkapi antara pemimpin lokal dan pemerintah. Dalam kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007), kepemimpinan fasilitatif ini berfungsi sebagai penggerak utama yang menjaga keberlanjutan kolaborasi serta memperkuat integrasi antara pengembangan ekowisata dan upaya pengurangan risiko bencana.

4. Proses Kolaborasi (Collaborative Process)

Proses kolaborasi dalam pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana di Desa Wisata Amping Parak berlangsung melalui rangkaian tahapan yang saling terkait, meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara. Tahapan ini sejalan dengan kerangka *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), di mana interaksi berkelanjutan antaraktor menjadi kunci terbentuknya kolaborasi.

Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Dialog tatap muka menjadi mekanisme utama dalam proses kolaborasi di Desa Wisata Amping Parak. Interaksi langsung antar pemangku kepentingan dilakukan melalui forum koordinasi, rapat bersama, kegiatan pelatihan, serta pendampingan di lapangan yang melibatkan pemerintah nagari, Pokdarwis LPPL, masyarakat, dan lembaga pendukung. Forum-forum tersebut berfungsi sebagai ruang komunikasi untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan ekowisata yang terintegrasi dengan upaya mitigasi bencana. Dialog tatap muka tidak terbatas pada pertemuan formal, tetapi juga berlangsung dalam aktivitas bersama di lapangan. Pola ini memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan secara langsung, penyamaan persepsi, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Intensitas dialog yang relatif tinggi memperkuat koordinasi antaraktor dan mencegah terjadinya kesenjangan informasi dalam pelaksanaan program.

Membangun Kepercayaan (*Trust-Building*)

Kepercayaan dalam kolaborasi pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana di Desa Wisata Amping Parak dibangun melalui komunikasi yang dilakukan secara rutin antar pihak yang terlibat. Komunikasi formal dilakukan melalui rapat koordinasi, pertemuan bersama, dan pelaksanaan kegiatan ekowisata berbasis mitigasi bencana.

Komunikasi informal juga dimanfaatkan untuk mendukung koordinasi lapangan, seperti melalui grup WhatsApp yang memudahkan penyampaian informasi secara cepat. Komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan ini membantu memperkuat kerja sama antara pemerintah nagari, Pokdarwis LPPL, masyarakat, dan pihak pendukung lainnya. Kepercayaan juga dibangun melalui keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan. Penyampaian laporan kegiatan, dokumentasi program, serta penjelasan terkait penggunaan bantuan dan hasil kegiatan dilakukan secara terbuka kepada pihak-pihak yang terlibat. Keterbukaan informasi ini membuat setiap aktor mengetahui perkembangan kegiatan yang sedang berjalan, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan ekowisata serta upaya pengurangan risiko bencana di Desa Wisata Amping Parak.

Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen terhadap proses kolaborasi dalam pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana di Desa Wisata Amping Parak tercermin dari keterlibatan aktif dan konsisten masyarakat, Pokdarwis LPPL, pemerintah nagari, dan OPD terkait dalam seluruh tahapan kegiatan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut tidak hanya muncul pada momen tertentu, tetapi berlangsung secara berkelanjutan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Bentuk keterlibatan tersebut dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dan pemuda dalam rapat perencanaan, kegiatan gotong royong, konservasi penyu, penanaman mangrove, pembangunan sarana pendukung ekowisata, dan dukungan terhadap agenda besar desa wisata, termasuk kegiatan berskala regional dan nasional. Pemerintah nagari dan OPD terkait juga secara konsisten hadir dalam kegiatan lapangan, baik dalam bentuk pendampingan, koordinasi lintas sektor, maupun dukungan teknis, yang semakin memperkuat keberlanjutan proses kolaborasi.

Keterlibatan tersebut tidak bersifat insidental, melainkan dilakukan secara berkelanjutan meskipun para aktor menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya. Keterlibatan yang terus berulang ini menunjukkan adanya komitmen terhadap proses (*commitment to process*), sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), bahwa kolaborasi yang efektif ditopang oleh kesediaan para aktor untuk tetap terlibat, menjaga keberlangsungan interaksi, dan berbagi tanggung jawab meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Konsistensi kehadiran dan kontribusi para aktor di Desa Wisata Amping Parak menegaskan bahwa kolaborasi tidak berhenti pada tataran formal atau simbolik, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesadaran kolektif bahwa pengembangan ekowisata dan pengurangan risiko bencana merupakan tujuan bersama yang hanya dapat dicapai melalui kerja sama jangka panjang antaraktor.

Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pemahaman bersama dalam proses kolaborasi pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana di Desa Wisata Amping Parak terbentuk melalui penyamaan persepsi antaraktor terhadap permasalahan utama yang dihadapi, yaitu tingginya kerentanan wilayah pesisir terhadap ancaman bencana. Penyamaan pemahaman ini tidak diawali dari kepentingan pengembangan wisata, melainkan dari kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga keselamatan kawasan dan kelestarian lingkungan pesisir sebagai prasyarat utama pembangunan ekowisata. Di Desa Wisata Amping Parak, pemahaman bersama tersebut berfungsi sebagai dasar untuk menyatukan arah kebijakan dan tindakan, sehingga kolaborasi tidak berjalan secara sektoral atau saling tumpang tindih. Pemahaman bersama ini juga berperan sebagai mekanisme pengendali potensi konflik. Proses penyamaan persepsi tidak hanya berlangsung melalui forum formal, tetapi juga terbentuk melalui interaksi yang berulang, diskusi informal, serta pengalaman kolektif dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana dan

pengelolaan ekowisata. Dengan demikian, kolaborasi di Desa Wisata Amping Parak berkembang atas dasar kesamaan pemahaman, yang memperkuat kerja sama antaraktor dalam mencapai tujuan pengembangan ekowisata yang tangguh terhadap risiko bencana.

Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil sementara dari proses kolaborasi terlihat dari percepatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, meningkatnya kemudahan kerja sama dan pengaturan kegiatan antar berbagai sektor, serta tumbuhnya rasa saling membutuhkan antaraktor. Pembangunan fasilitas wisata dan pendukung mitigasi bencana dapat terealisasi melalui penggabungan sumber daya dari berbagai lembaga sesuai dengan kewenangan dan program masing-masing. Beberapa capaian atau hasil sementara dari kolaborasi yaitu, pembangunan homestay, sekretariat Pokdarwis, akses jalan menuju kawasan ekowisata, dan penyediaan sarana mitigasi bencana seperti peralatan evakuasi dan sistem peringatan dini tsunami. Kolaborasi juga menghasilkan manfaat sosial berupa meningkatnya kepercayaan, solidaritas, dan rasa kebersamaan antaraktor

Ansell dan Gash (2008) mengatakan bahwa hasil sementara sebagai *small wins* yang berfungsi menjaga keberlanjutan kolaborasi. Capaian-capaian awal di Desa Wisata Amping Parak berguna dalam memperkuat kepercayaan antaraktor dan menarik dukungan lembaga eksternal. Hasil sementara tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan psikologis. Penguatan jejaring kerja sama dan meningkatnya kapasitas aktor lokal menjadi modal bagi keberlanjutan pengembangan ekowisata berbasis PRB. Dengan demikian, proses kolaborasi yang berjalan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu menghasilkan dampak nyata sejak tahap awal implementasi.

Berdasarkan temuan tersebut, proses kolaborasi dalam pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana di Desa Wisata Amping Parak telah berjalan secara baik dan berkesinambungan. Dialog tatap muka yang intensif, komunikasi yang terbuka, dan keterlibatan aktor yang konsisten menunjukkan bahwa mekanisme kolaboratif tidak hanya berlangsung pada tataran formal, tetapi juga terimplementasi dalam praktik lapangan. Komitmen bersama dan pemahaman yang sama terhadap isu kerentanan bencana menjadi fondasi utama yang menjaga kolaborasi tetap terarah dan tidak berjalan secara sektoral. Capaian hasil sementara yang dihasilkan berfungsi sebagai penguat kepercayaan dan legitimasi kolaborasi, sehingga proses kolaborasi di Desa Wisata Amping Parak berada pada jalur yang mendukung keberlanjutan pencapaian tujuan jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengembangan ekowisata berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Desa Wisata Amping Parak telah berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi awal kolaborasi ditandai oleh adanya ketidakseimbangan sumber daya antaraktor, yang justru menjadi pemicu terbentuknya kerja sama karena masing-masing pihak menyadari keterbatasan dan kebutuhan akan dukungan aktor lain. Insentif partisipasi tidak hanya bersifat material, tetapi juga didorong oleh kepentingan bersama untuk menjaga keselamatan kawasan pesisir dan kelestarian lingkungan, sehingga menciptakan dasar motivasi kolaboratif yang kuat.

Desain kelembagaan kolaborasi didukung oleh adanya regulasi dan dokumen perencanaan yang jelas, dan pelebagaan Pokdarwis LPPL sebagai simpul utama koordinasi antaraktor. Kejelasan aturan, mekanisme kerja sama formal, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa tata kelola kolaborasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga

terimplementasi secara konsisten dalam praktik pengelolaan ekowisata berbasis PRB. Kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi. Kepemimpinan lokal yang bersifat partisipatif dan persuasif, serta peran pemerintah sebagai fasilitator, mampu membangun kepercayaan, mendorong partisipasi, dan menjembatani kepentingan aktor yang beragam.

Proses kolaborasi berjalan melalui dialog tatap muka yang intensif, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara. Hasil-hasil awal berupa pembangunan sarana prasarana, penguatan jejaring kerja sama, serta meningkatnya solidaritas sosial berfungsi sebagai *small wins* yang memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kolaborasi. Dengan demikian, kolaborasi di Desa Wisata Amping Parak menunjukkan karakteristik *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash, dan berpotensi menjadi model pengembangan desa wisata yang tangguh terhadap risiko bencana.

REFERENSI

- Akbar, A., Harahap, R. H., & Rujiman, R. (2022). Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata Melalui Peran Kreativitas Pemuda. *Perspektif*, 11(1), 69-76.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Arifin, N. (2019). *Manajemen Sumberdaya Manusia: Teori dan Kasus*. Jepara: Unisnu Press.
- Badan Informasi Geospasial. (2024). Data Pulau Indonesia tahun 2024. Sistem Informasi Pulau-Pulau Indonesia (SI PULAU). <https://sipulau.big.go.id>
- Hardiyansyah, H. (2023). Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 21(1), 15-26.
- Jadesta. (2024). Profil Desa Wisata Amping Parak – Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). <https://jadesta.kememparekraf.go.id>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). Rencana Strategis Kememparekraf-Baparekraf 2020-2024. https://katalogdata.kememparekraf.go.id/dataset/bdb904d7-5f62-49d0-a924-6fb71157ce20/resource/5ad4cd33-8263-4036-ba19-70ff0b2741f2/download/rencana-strategis-kememparekraf-baparekraf-2020-2024-perubahan_comp.pdf
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). Pedoman Desa Wisata (Edisi II). Jadesta. <https://jadesta.kememparekraf.go.id/getdata/file/Buku-Membangun-Desa.pdf>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140-148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Mongabay.co.id. (2024). Desa Wisata Amping Parak Kembangkan Ekowisata Tangguh Bencana. <https://www.mongabay.co.id>
- Mulia, V. B. (2021). Memahami dan mengelola dampak pariwisata. *Jurnal Kepariwisata*, 20(1), 75-85.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Pengelolaan Desa Wisata. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/248521/permenpar-no-3-tahun-2022>